

Analisis pendanaan program dan pengobatan penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Lebak tahun 2005-2007

Firman Rachmatullah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20343254&lokasi=lokal>

Abstrak

Penyakit Demam Berdarah merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak luas bagi kehidupan, karena merupakan penyakit menular yang berbahaya oleh karena dapat menimbulkan kematian dalam waktu singkat dan sering menimbulkan wabah. Kabupaten Lebak merupakan kabupaten yang dapat berpolensi terjadinya kasus luar biasa (KLB) demam Berdarah Dengue, untuk itu maka perlu perhatian dari pemerintah daerah untuk menyiapkan baik dana maupun sarana dalam mengantisipasi kejadian tersebut. Kebijakan otonomi dalam era desentralisasi menyebabkan bidang kesehatan menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah Kabupaten/Kota didalam penyelenggaraan pembangunannya untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan sebagai konskuensinya pemerintah kabupaten/kota harus menyusun kebijakan, termasuk kebijakan pembiayaan dalam upaya pembangunan kesehatan tersebut. Sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis mengenai pendanaan program yang bersumber pemerintah baik untuk pemberantasan maupun pengobatannya di Kabupaten Lebak. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar pendanaan program pemberantasan Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Lebak baik untuk Upaya peningkatan Kesehatan Masyarakat (UKM) maupun untuk Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan (UKP), berapa persentasenya dari anggaran kesehatan maupun dari APBD, dan bagaimana pengalamannya untuk kegiatan apa saja yang menjadi prioritas. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lebak pada Instansi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Di RSUD Adji Dharmo yang merupakan Rumah sakit Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, sebagai pengelola anggaran program Demam Berdarah Dengue bersumber pemerintah di Kabupaten Lebak. Analisis pendanaan program pemberantasan DBD menggunakan data anggaran tahun 2005, tahun 2006 dan data anggaran tahun 2007. Dari hasil analisis tersebut didapatkan besaran anggaran bersumber pemerintah untuk program UKM DBD tahun 2005 adalah sebesar Rp.102.035.000 sedangkan untuk tahun 2006 adalah sebesar Rp. 80.821.000 dan untuk tahun anggaran 2007 adalah 242.384.000. Besaran anggaran yang digunakan untuk Program UKP yang bersumber pemerintah (kelas III) adalah untuk tahun 2005 sebesar Rp. 1.518.750, untuk tahun 2006 sebesar 16.258.800. sedangkan untuk tahun 2007 besarnya adalah sebesar Rp. 44.305.308. Dengan menggunakan angka estimasi bank dunia untuk kebutuhan program esensial dimana Demam Berdarah Dengue termasuk didalamnya maka realisasi pendanaan untuk program DBD di Kabupaten Lebak baru mencapai 201,50 perkapita/tahun dari estimasi kebutuhan standar bank dunia untuk program DBD adalah sebesar 4.923 perkapita/tahun. Pada analisis kasus diketahui terdapat kecamatan endemis untuk kasus Demam Berdarah yaitu kecamatan Rangkasbitung, kecamatan Cibadak, Kecamatan Kalang Anyar, Kecamatan Bojong manik dan Kecamatan Cileles. Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak untuk dapat memanfaatkan lebih optimal kebijakan pemda dalam alokasi pendanaan untuk lebih efektif dan efisien dalam penentuan dan penggunaan berdasarkan skala prioritas.

.....Dengue Haemorrhagic Fever disease is a public health problem that affects widely in life because it is a

dangerous and contagious disease which can cause death in a short period and become epidemic oftenly. Regency of Lebak is an area that has a potentiality for extraordinary case (KLB) of dengue fever. Therefore, need more attention from local government in preparing fund and also means for anticipating this problem. Autonomous policy in the era of decentralization has placed health sector as its local government's responsibility and obligation; and thus, makes local government has to arrange local policy including funding policy in order to develop enough progress in health sector. Until now, there is no study from the government, which analyze the timing program either for eradicating or medication of dengue haemorrhagic fever in Regency of Lebak. Therefore this research is conducted in order to know how much the funding program for dengue haemorrhagic fever's eradication in Lebak for both Public Health Improvement Effort (UKM) and Personal Health Improvement Effort. And also to know how much the percentage from either health budget or APBD; how is its usage, what activities that become the first priority. This research is executed on the Institution of Public Health Service and Social Prosperity and on RSUD Adjidharmo in Regency of Lebak, as the organizer of dengue haemorrhagic fever's funding program that comes from its local government. Dengue Haemorrhagic fever's eradication funding program analysis uses all budget data in 2005, 2006 and 2007. From the analysis we found that the amount of budget from local government for UKM DBD program in the year of 2005 is 102.035.000 IDR; while 2006 is 80.821000 IDR and for 2007 is 242.384.000 IDR. The amount of budget used for UKP Program which is based on government (class III) in the year of 2005 is 1.518.750 IDR, and 2006 is 16,258.800 IDR, and 2007 is 44.305.308 IDR. By using world bank's estimation number for essential program requirement where dengue haemorrhagic fever is included, hence the realization of dengue haemorrhagic fever's funding program in Lebak is about 201,50 per capita/year while the world bank's standard requirement estimation is about 4.923 per capita/year. On case analysis, known that there is endemic sub-district for dengue haemorrhagic fever case, which are Rangkasbitung, Cibadak, Kalang Anyar, Bojong Manik and Cileles. Pursuant to the result of the research, the writer suggests the Public Health Service and Social Prosperity Institution in Regency of Lebak to make use the local government's policy more optimal especially in funding allocation to be more effective and efficient base on priority scale.